



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VII

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN**

NOMOR : PER-01/ M.EKON/01/2010

TANGGAL : 29 JANUARI 2010

**TARGET KEGIATAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

KEGIATAN (1)	INDIKATOR KEGIATAN (2)	TARGET			
		2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)
SEKRETARIAT					
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERENCANAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah konsep rencana kerja dan anggaran • % kemajuan reformasi birokrasi di bidang organisasi dan tata laksana (ortala) • % pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi yang digunakan oleh stakeholder berjenjang • % laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tepat waktu dan sesuai standar 	9 eks 75 % 80 % 85 %	9 eks 80 % 85 % 100 %	9 eks 90 % 90 % 100 %	9 eks 95 % 95 % 100 %
KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERSIDANGAN, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penerbitan majalah perekonomian, buku profil, buku informasi perekonomian, dan dokumentasi foto • Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi Kebijakan Bidang Perekonomian • Jumlah penyiapan dan pelaksanaan rapat koordinasi dan kegiatan Menko Perekonomian • % pelaporan rapat koordinasi dan laporan evaluasi pelaksanaan rapat koordinasi tepat waktu • Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan • Jumlah telahaan/analisa hukum dan peraturan perundang-undangan • Jumlah penyebaran informasi secara elektronik (<i>Electronic Public Relation</i>) terhadap pelaksanaan kebijakan pada bidang perekonomian melalui media elektronik • % sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 	6 2 90 80 % 75 6 24 70	8 3 95 85 % 80 8 30 75	8 5 95 90 % 80 10 36 80	10 6 100 95 % 85 12 48 85



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 2 ~

KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> • % penempatan pegawai sesuai persyaratan kompetensi • % kepatuhan pegawai dalam pelaksanaan disiplin • % pengembangan <i>character building</i> pegawai melalui pelatihan • % laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) • % hasil pemantauan dan evaluasi APIP yang diindaklanjuti • % anggaran yang cair tepat waktu • % implementasi Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara/SIMAK BMN) • Jumlah dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dapat diselesaikan • % peningkatan manajemen kearsipan dalam rangka penatausahaan arsip modern • % pemenuhan sarana dan prasarana kerja% 	85 %	90 %	95 %	100 %
KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase ketidaktaatan dalam pelaksanaan kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku • Persentase potensi kerugian negara • Jumlah laporan hasil pengawasan tepat waktu 	100 %	100 %	100 %	100 %
KEGIATAN PENELAAHAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan kegiatan bidang hukum dan kelembagaan yang dilaksanakan • Jumlah laporan kegiatan bidang persaingan usaha yang dilaksanakan • Jumlah laporan kegiatan bidang penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan • Jumlah laporan kegiatan bidang investasi dan kemitraan pemerintah-swasta yang dilaksanakan • Jumlah laporan kegiatan bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan • Jumlah laporan kegiatan bidang inovasi teknologi yang dilaksanakan 	4	4	4	4



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 3 ~

DEPUTI I					
KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN MAKRO (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan makro yang tepat waktu • Persentase penerbitan laporan tahunan kebijakan makro yang berkualitas • Persentase jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan makro yang menghasilkan kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang terkait • Persentase kajian yang efektif dan mendukung perumusan kebijakan makro 	55 %	60 %	65 %	75 %
		75 %	80 %	85 %	90 %
		75 %	80 %	85 %	90 %
		50 %	75 %	75 %	100%
KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan fiskal yang tepat waktu • Persentase penerbitan laporan tahunan kebijakan fiskal yang berkualitas • Persentase jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal yang menghasilkan kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang terkait • Persentase kajian yang efektif dan mendukung perumusan kebijakan fiskal 	65 %	70 %	75 %	80 %
		75 %	80 %	80 %	85 %
		75 %	80 %	80 %	85 %
		30 %	40 %	50 %	60 %
KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan BUMN yang tepat waktu • Persentase penerbitan laporan tahunan kebijakan BUMN yang berkualitas • Persentase jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan BUMN yang menghasilkan kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang terkait • Persentase kajian yang efektif dan mendukung perumusan kebijakan BUMN 	65 %	70 %	75 %	80 %
		75 %	80 %	80 %	85 %
		70 %	75 %	80 %	85 %
		30 %	40 %	50 %	60 %
KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PASAR MODAL, PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank yang tepat waktu • Persentase penerbitan laporan tahunan kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank yang berkualitas 	65 %	70 %	75 %	80 %
		75 %	75 %	80 %	85 %



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 4 ~

	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank yang menghasilkan kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang terkait Persentase kajian yang efektif dan mendukung perumusan kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank 	72 %	75 %	80 %	85 %
		40 %	45 %	55 %	60 %
KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan KUR yang tepat waktu 	65 %	70 %	75 %	80 %
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penerbitan laporan tahunan kebijakan KUR yang berkualitas 	76 %	80 %	82 %	85 %
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan KUR yang menghasilkan kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang terkait 	77%	82 %	84 %	85 %
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kajian yang efektif dan mendukung perumusan kebijakan KUR 	30 %	40 %	50 %	60 %
KOORDINASI PEMBIAYAAN KREDIT, ASURANSI, DAN REMITANSI UNTUK PEKERJA MIGRAN (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan Tersedianya skim kredit perbankan bagi pekerja migran pada tingkat nasional. Perubahan ketentuan asuransi TKI yang mengutamakan perbaikan tata kelola konsorsium asuransi TKI. Meningkatnya jumlah lembaga keuangan nasional dan kualitas produknya dalam melayani remitansi pekerja migran. 	65 %	70 %	75 %	80 %
KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang tepat waktu 	65 %	70 %	75 %	80 %
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penerbitan laporan tahunan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang berkualitas 	76 %	80 %	82 %	85 %
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah 	77%	82 %	84 %	85 %



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 5 ~

	<p>yang menghasilkan kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase kajian yang efektif dan mendukung perumusan kebijakan ekonomi & keuangan daerah 	30 %	40 %	50 %	60 %
DEPUTI II					
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN URUSAN PANGAN (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan koordinasi bidang pangan Jumlah kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan Jumlah kegiatan pemantauan, dan evaluasi pasokan dan harga pangan % rekomendasi hasil koordinasi bidang pangan % sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan yang dilaksanakan 	6 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 100 % 80%	6 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 100 % 80%	7 kegiatan 4 kegiatan 2 kegiatan 100 % 80%	7 kegiatan 4 kegiatan 2 kegiatan 100 % 95%
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN URUSAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan koordinasi bidang perikanan dan peternakan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan peternakan Jumlah rekomendasi kebijakan kebijakan pangan berbasis perikanan Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi kelautan Jumlah rekomendasi restrukturisasi peternakan % rekomendasi hasil koordinasi bidang perikanan dan peternakan % rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan peternakan yang dilaksanakan 	4 kegiatan 24 kali 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 80 % 80%	4 kegiatan 24 kali 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 85 % 85%	4 kegiatan 24 kali 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 90 % 90%	4 kegiatan 24 kali 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 100 % 100%
KEGIATAN KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan koordinasi bidang perkebunan dan hortikultura Jumlah kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan dan hortikultura % rekomendasi kebijakan perkebunan dan hortikultura 	6 kegiatan 36 kali 85%	6 kali 36 kali 85%	7 kegiatan 36 kali 90%	8 kegiatan 36 kali 100 %
KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan bahan bakar nabati % rekomendasi kebijakan koordinasi bidang 	1 kegiatan 85%	1 kegiatan 85%	1 kegiatan 90%	1 kegiatan 100%



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 6 ~

	pengembangan bahan bakar nabati yang dilaksanakan				
KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi % rekomendasi hasil koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi yang dilaksanakan 	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
		85%	85%	90%	100%
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN URUSAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN KELAUTAN KHUSUSNYA PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan koordinasi urusan sarana dan prasarana pertanian dan kelautan khususnya perikanan Jumlah kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian dan kelautan khususnya perikanan % rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana pertanian dan kelautan khususnya perikanan yang dilaksanakan % sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana pertanian dan kelautan khususnya perikanan yang dilaksanakan 	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
		85%	90%	95%	100%
		85%	90%	95%	100%
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN PERTANIAN DAN KELAUTAN KHUSUSNYA PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan koordinasi bidang kelembagaan dan pembiayaan pertanian dan kelautan khususnya perikanan Jumlah kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pembiayaan pertanian dan kelautan khususnya perikanan % rekomendasi kebijakan bidang kelembagaan dan pembiayaan pertanian dan kelautan khususnya perikanan yang dilaksanakan. 	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
		18 kali	18 kali	18 kali	18 kali
		75%	75%	80%	80 %
DEPUTI III					
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG MINYAK BUMI, EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARANCY, DAN ENERGI ALTERNATIF (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang minyak bumi, extractive industries transparency, dan energi alternatif Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan implementasi kebijakan minyak bumi, extractive 	3	3	3	3
		3	3	3	3



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 7 ~

	<ul style="list-style-type: none"> industries transparency, dan energi alternatif • Jumlah permasalahan yang teridentifikasi dikegiatan minyak bumi, extractive industries transparency, dan energi alternatif • Jumlah rekomendasi terhadap penyelesaian masalah implementasi kebijakan minyak bumi, extractive industries transparency, dan energi alternatif • Jumlah stake holder yang berkomitmen terhadap kebijakan <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> 	6	6	6	6
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang gas bumi • Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan implementasi kebijakan gas bumi • Jumlah permasalahan yang teridentifikasi dikegiatan gas bumi • Jumlah rekomendasi terhadap penyelesaian masalah implementasi kebijakan gas bumi 	1	1	1	1
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG GAS BUMI	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang pertambangan umum • Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan implementasi kebijakan bidang pertambangan umum • Jumlah permasalahan yang teridentifikasi dikegiatan pertambangan umum • Jumlah rekomendasi terhadap penyelesaian masalah implementasi kebijakan pertambang umum 	1	1	1	1
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG PERTAMBANGAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang energi, dan ketenagalistrikan; • Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan implementasi kebijakan bidang energi, dan ketenagalistrikan, • Jumlah permasalahan 	1	1	1	1
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah permasalahan 	1	1	1	1



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 8 ~

	<ul style="list-style-type: none"> yang teridentifikasi dikegiatan energi, dan ketenagalistrikan; Jumlah rekomendasi terhadap penyelesaian masalah implementasi kebijakan energi, dan ketenagalistrikan; 	1	1	1	1
		1	1	1	1
KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang kehutanan; 	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan implementasi kebijakan bidang kehutanan; 	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah permasalahan yang teridentifikasi dikegiatan kehutanan; 	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rekomendasi terhadap penyelesaian masalah implementasi kebijakan kehutanan. 	1	1	1	1
DEPUTI IV					
KEGIATAN KOORDINASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase rekomendasi kebijakan peningkatan dan pengembangan industri manufaktur yang terimplementasikan; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks efektifitas kebijakan industri, perdagangan, investasi, UMKM dan pariwisata; 	4	4	4	4
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penyelesaian kasus-kasus di bidang industri manufaktur; 	80%	80%	80%	80%
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan industri manufaktur; 	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri manufaktur yang ditindaklanjuti; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase laporan kajian kebijakan industri manufaktur yang ditindaklanjuti; 	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan perpupukan nasional; 	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian masalah khusus dari pimpinan yang bersifat adhoc 	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM USAHA	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase rekomendasi kebijakan perbaikan iklim usaha yang terimplementasikan; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penyelesaian kasus-kasus di bidang perbaikan iklim usaha 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan 	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 9 ~

	<p>kebijakan perbaikan iklim usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perbaikan iklim usaha yang ditindaklanjuti; • Persentase laporan kajian kebijakan perbaikan iklim usaha yang ditindaklanjuti; • Jumlah penyelesaian masalah khusus dari pimpinan yang bersifat adhoc 	80%	80%	80%	80%
		100%	100%	100%	100%
		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
KEGIATAN KOORDINASI PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI (PEPI) (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase rekomendasi pelaksanaan keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi yang terimplementasikan; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penyelesaian kasus-kasus pelaksanaan keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi ; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi; 	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi yang ditindaklanjuti; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase laporan kajian pelaksanaan keterpaduan promosi pariwisata, perdagangan dan investasi yang ditindaklanjuti 	100%	100%	100%	100%
KEGIATAN KOORDINASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase rekomendasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penyelesaian kasus-kasus di bidang peningkatan dan pengembangan ekspor; 	80%	80%	80%	80%
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor; 	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang ditindaklanjuti; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase laporan kajian kebijakan 	100%	100%	100%	100%



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 10 ~

	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan dan pengembangan ekspor yang ditindaklanjuti; Jumlah penyelesaian masalah khusus dari pimpinan yang bersifat adhoc 	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM NASIONAL SINGLE WINDOW DAN INTEGRASI KEDALAM SISTEM ASW (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase rekomendasi kebijakan penerapan dan pengembangan sistem NSW yang terimplementasikan; 	90%	90%	90%	90%
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan koordinasi pengintegrasian sistem NSW ke ASW 	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan penerapan dan pengembangan sistem NSW; 	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rekomendasi hasil koordinasi penerapan dan pengembangan sistem NSW yang ditindaklanjuti; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan dan pengembangan sistem NSW yang ditindaklanjuti; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase laporan kajian tentang manfaat dan efektifitas penerapan sistem NSW yang ditindaklanjuti 	100%	100%	100%	100%
KEGIATAN KOORDINASI DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase rekomendasi kebijakan distribusi komoditas nasional dan pengawasan barang beredar yang terimplementasikan; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penyelesaian kasus-kasus di bidang distribusi komoditas nasional dan pengawasan barang beredar; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan distribusi komoditas nasional dan pengawasan barang beredar; 	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan distribusi komoditas nasional dan pengawasan barang beredar yang ditindaklanjuti; 	85%	85%	85%	85%
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase laporan kajian kebijakan industri manufaktur yang ditindaklanjuti; Jumlah laporan kegiatan koordinasi kebijakan pengembangan daerah perbatasan yang ditindaklanjuti; 	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian masalah khusus dari 	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 11 ~

	pimpinan yang bersifat adhoc				
KEGIATAN KOORDINASI PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL (PRIORITAS NASIONAL)	• Prosentase rekomendasi kebijakan pembenahan sistem logistik nasional yang terimplementasikan;	80%	80%	80%	80%
	• Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan pembenahan sistem logistik nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	• Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan yang ditindaklanjuti;	85%	85%	85%	85%
	• Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembenahan sistem logistik nasional yang ditindaklanjuti;	85%	85%	85%	85%
	• Jumlah rekomendasi kajian kebijakan pembenahan sistem logistik nasional yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%	100%
KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM, KOPERASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	• Prosentase rekomendasi kebijakan pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Industri Pariwisata yang terimplementasikan;	85%	85%	85%	85%
	• Prosentase penyelesaian kasus-kasus di bidang pemberdayaan UMKM, Koperasi dan industri pariwisata;	85%	85%	85%	85%
	• Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM, Koperasi dan industri pariwisata;	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	• Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM, Koperasi dan industri pariwisata yang ditindaklanjuti;	85%	85%	85%	85%
	• Jumlah laporan kajian kebijakan pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Industri Pariwisata yang ditindaklanjuti;	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	• Jumlah penyelesaian masalah khusus dari pimpinan yang bersifat adhoc	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
KEGIATAN KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN UKM BERBASIS TEKNOLOGI (PRIORITAS NASIONAL)	• Prosentase rekomendasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi	85%	85%	85%	85%
	• Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
	• Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi	85%	85%	85%	85%



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 12 ~

	<ul style="list-style-type: none"> • yang ditindaklanjuti; • Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti; • Persentase laporan kajian kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti; 	85%	85%	85%	85%
		100%	100%	100%	100%
DEPUTI V					
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN URUSAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah Rakor Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi 	75 %	80 %	80 %	85 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase rekomendasi kebijakan Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi 	65 %	70 %	75 %	75 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang akurat, dan tepat waktu 	90 %	90 %	95 %	95 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kualitas kajian Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah 	90 %	90 %	90 %	90 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah sosialisasi kebijakan dibidang Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terlaksana 	70 %	75 %	75 %	80 %
			75 %	80 %	80 %
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN URUSAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah Rakor Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air yang terimplementasi 	65 %	70 %	75 %	75 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase rekomendasi kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air yang terimplementasi 	90%	90 %	95 %	95 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air yang akurat, dan tepat waktu 	90 %	90 %	90 %	90 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kualitas kajian Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air 	70 %	75 %	75 %	80 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah sosialisasi kebijakan dibidang infrastruktur sumber daya air yang terlaksana 	75 %	80 %	80 %	85 %
			65 %	70 %	75 %
KOORDINASI PENGEMBANGAN URUSAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah Rakor Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi 	65 %	70 %	75 %	75 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase rekomendasi kebijakan Urusan Infrastruktur 				



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 13 ~

	<ul style="list-style-type: none"> Transportasi yang terimplementasi • Persentase jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Infrastruktur Transportasi yang akurat, dan tepat waktu • Indeks kualitas kajian Urusan Infrastruktur Transportasi • Persentase jumlah sosialisasi kebijakan dibidang Infrastruktur Transportasi yang terlaksana 	90 %	90 %	95 %	95 %
		90 %	90 %	90 %	90 %
		70 %	75 %	75 %	80 %
KOORDINASI PENGEMBANGAN URUSAN PERUMAHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah Rakor Urusan Perumahan yang terimplementasi • Persentase rekomendasi kebijakan Urusan Urusan Perumahan yang terimplementasi • Persentase jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Perumahan yang akurat, dan tepat waktu • Indeks kualitas kajian Urusan Perumahan • Persentase jumlah sosialisasi kebijakan dibidang Perumahan yang terlaksana 	75 %	80 %	80 %	85 %
		65 %	70 %	75 %	75 %
		90 %	90 %	95 %	95 %
		90 %	90 %	90 %	90 %
		70 %	75 %	75 %	80 %
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN URUSAN TELEMATIKA DAN UTILITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah Rakor Urusan Telematika dan Utilitas yang terimplementasi • Persentase rekomendasi kebijakan Urusan Telematika dan Utilitas yang terimplementasi • Persentase jumlah laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Telematika dan Utilitas yang akurat, dan tepat waktu • Indeks kualitas kajian Urusan Telematika dan Utilitas • Persentase jumlah sosialisasi kebijakan dibidang Telematika dan Utilitas yang terlaksana 	75 %	80 %	80 %	85 %
		65 %	70 %	75 %	75 %
		90 %	90 %	95 %	95 %
		90 %	90 %	90 %	90 %
		70 %	75 %	75 %	80 %
DEPUTI VI					
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAN PEMBIAYAAN ASIA (PRIORITAS NASIONAL)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan kegiatan koordinasi bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia • Jumlah laporan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia • Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama 	5	5	6	7
		2	2	2	3
		5	5	6	7



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 14 ~

	ekonomi dan pembiayaan Asia				
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAN PEMBIAYAAN AMERIKA DAN PASIFIK (PRIORITAS NASIONAL)	• Jumlah laporan kegiatan koordinasi bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Amerika dan Pasifik	5	5	6	7
	• Jumlah laporan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Amerika dan Pasifik	2	2	2	3
	• Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Amerika dan Pasifik	5	5	6	7
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAN PEMBIAYAAN EROPA, AFRIKA DAN TIMUR TENGAH	• Jumlah laporan kegiatan koordinasi bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah	5	5	6	7
	• Jumlah laporan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah	2	2	2	3
	• Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah	5	5	6	7
KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAN PEMBIAYAAN MULTILATERAL	• Jumlah laporan kegiatan koordinasi bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan dengan lembaga multilateral.	5	5	6	7
	• Jumlah laporan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan dengan lembaga multilateral.	2	2	2	3
	• Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan dengan lembaga multilateral.	5	5	6	7



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

~ 15 ~

<i>KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAN PEMBIAYAAN REGIONAL</i>	• Jumlah laporan kegiatan koordinasi bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan regional.	5	5	6	7
	• Jumlah laporan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan regional.	2	2	2	3
	• Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan regional	5	5	6	7

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, S.H.,M.H.
NIP 19531005 197303 1 001